

Menjelaskan perkembangan Islam pada masa khalifah ke I IV

Safina Desfianti¹, Ema Deva Amilia², Hudaidah³

Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia¹

Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia²

Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia³

Email: safinadesfianti@gmail.com¹, emadevaamilia3@gmail.com², hudaidah@fkip.unsri.ac.id³

Corresponding Author: Safina Desfianti, safinadesfianti@gmail.com

Doi: 10.31316/karmawibangga.v8i1.9074

Abstrak

Periode Khulafaur Rasyidin (632-661 M) merupakan periode krusial dalam sejarah Islam, menandai peralihan kekuasaan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Islam pada masa pemerintahan empat khalifah pertama, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, dengan menelaah berbagai sumber sejarah dan literatur Islam, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Abu Bakar berfokus pada pemulihan stabilitas masyarakat melalui pemberantasan kemurtadan dan kodifikasi Al Qur'an. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah Islam berkembang pesat di Persia, Suriah, dan Mesir, disertai dengan pembentukan sistem administrasi pemerintahan. Utsman bin Affan menekankan standarisasi manuskrip Al-Qur'an dan ekspansi ke Afrika Utara dan Armenia. Meskipun era Ali bin Abi Thalib diwarnai oleh konflik internal, beliau tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan ilmu pengetahuan. Kepemimpinan keempat khalifah ini pada akhirnya meletakkan fondasi yang kokoh bagi peradaban Islam yang berlandaskan keadilan, ketertiban, dan tauhid.
Katakunci: Khalifah, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, peradaban Islam.

Abstract

The Khulafaur Rasyidin period (632-661 AD) was a crucial period in Islamic history, marking the transition of power after the death of the Prophet Muhammad. This study aims to analyze the development of Islam during the reigns of the first four caliphs: Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, and Ali ibn Abi Talib. Data collection was conducted through literature review, examining various historical sources and Islamic literature, which were then analyzed using descriptive qualitative methods. The findings show that Abu Bakr focused on restoring social stability by eradicating apostasy and codifying the Qur'an. During the reign of Umar bin Khattab, the Islamic territory expanded rapidly in Persia, Syria, and Egypt, accompanied by the establishment of a government administrative system. Uthman bin Affan emphasized the standardization of the Qur'an manuscript and expansion into North Africa and Armenia. Although the era of Ali bin Abi Talib was marked by internal conflict, he continued to uphold the values of justice and science. The leadership of these four caliphs ultimately laid a solid foundation for an Islamic civilization based on justice, order, and monotheism.

Keywords: Caliphs, Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Islamic civilization.

PENDAHULUAN

Sejak awal kemunculannya, Islam telah memberikan landasan ajaran yang kokoh melalui Al Qur'an, sebagai pedoman hidup manusia. Kitab suci ini menjanjikan dan menetapkan bahwa umat Islam akan menjadi umat terbaik di antara umat manusia, asalkan mereka berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan dan menerapkannya dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya mereka. Keyakinan ini mendorong umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif, sekaligus memberikan tuntunan bagi pembentukan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual (Aziba et al., 2025).

Namun, sepanjang sejarah, proses penerapan ajaran Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad (saw) menghadapi beberapa tantangan besar, terutama dalam menentukan keberlangsungan kepemimpinan umat. Nabi tidak secara langsung menunjuk seorang penerus, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara para sahabat tentang siapa yang layak memimpin umat Islam. Perbedaan-perbedaan ini memunculkan dinamika politik dan sosial yang cukup kompleks, karena masing-masing kelompok mengemukakan pendapat dan argumennya sendiri dalam memilih khalifah yang akan menggantikan Nabi. Hal ini menandai dimulainya periode krusial dalam sejarah Islam, yaitu periode Khalifah yang Diberi Petunjuk (Hadiono, A. F. 2023).

Empat khalifah pertama Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memainkan peran penting dalam membangun sistem pemerintahan Islam dan memperluas kerajaan Islam. Setiap khalifah menghadapi tantangan yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan konteks sosial dan politik pada masanya. Abu Bakar berfokus pada pemulihan persatuan umat dan pemberantasan kemurtadan; Umar memperkuat sistem pemerintahan dan memperluas wilayah kekuasaannya; Utsman menyempurnakan kodifikasi Al-Qur'an dan memperluas kerajaan Islam; sementara Ali menghadapi konflik internal yang mengancam stabilitas umat (Ikrom, M., Maulana, M. H., Rasyidah, J. Z., & Al Faruq, U. 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana kepemimpinan keempat khalifah ini membentuk fondasi sistem pemerintahan Islam dan tatanan sosial masyarakat Muslim. Mempelajari era para Khalifah yang Saleh tidak hanya memberikan gambaran historis tentang transisi kepemimpinan, tetapi juga mengungkap nilai-nilai moral, keadilan, dan kebijaksanaan yang menjadi fondasi peradaban Islam. Penelitian ini relevan karena memahami model kepemimpinan Islam awal dapat memberikan informasi bagi penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks sosial dan politik kontemporer.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif perkembangan Islam pada masa pemerintahan empat khalifah pertama, menyoroti kebijakan, tantangan, dan kontribusi mereka terhadap pembentukan peradaban Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitisnya yang menekankan integrasi aspek politik, sosial, dan spiritual dalam memahami dinamika pemerintahan Islam awal. penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah Islam dan memberikan perspektif baru tentang fondasi peradaban yang dibangun pada era Khalifah-Khalifah yang Terbimbing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan bibliografi. Topik penelitian terdiri dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan masa pemerintahan empat khalifah pertama: Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sumber data meliputi buku-buku sejarah

Islam, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan literatur lain yang menggambarkan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan agama selama era Khalifah al-Syarif.

Proses pengumpulan data melibatkan tiga langkah utama. Pertama, peneliti mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber literatur yang memenuhi kriteria relevansi dengan topik penelitian, baik dari segi waktu, konteks, maupun isi pembahasan. Kedua, semua data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan masa pemerintahan masing-masing khalifah untuk memudahkan analisis komparatif. Ketiga, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap setiap sumber, dengan fokus pada kebijakan, keputusan, dan peristiwa penting yang terjadi selama periode tersebut.

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, menjelaskan setiap fenomena kepemimpinan berdasarkan konteks historisnya dan menganalisis hubungan antara kebijakan para khalifah dan perkembangan peradaban Islam. Teknik analisis dilakukan melalui interpretasi kritis terhadap data sekunder yang terkumpul, mengkaji model kepemimpinan, sistem pemerintahan, dan dinamika sosial-politik yang muncul pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang kontribusi keempat khalifah dalam meletakkan fondasi bagi peradaban Islam yang maju, adil, dan berbasis nilai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Periode Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq

Abu Bakar ash-Shiddiq adalah khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam), yang pemerintahannya menandai dimulainya pembentukan sistem pemerintahan Islam pasca-kenabian. Masa pemerintahannya dapat dianggap sebagai periode transisi yang krusial, di mana umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan integritas iman mereka. Setelah wafatnya Nabi, banyak suku di Jazirah Arab menolak membayar zakat, dan beberapa bahkan kembali ke keyakinan lama mereka. Fenomena kemurtadan dan munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas politik dan spiritual umat (Muhammad, M. 2020). Dalam situasi kritis ini, Abu Bakar menunjukkan keteguhan dan keberanian yang luar biasa dengan memutuskan untuk memerangi mereka yang menentang Islam melalui Perang Riddah, sebagai langkah strategis untuk menjaga integritas umat dan menegakkan kembali hukum Allah.

Kebijakan Abu Bakar dalam menghadapi pergolakan sosial dan politik ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga berdimensi moral dan keagamaan yang mendalam. Beliau menekankan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang tidak dapat dipisahkan dari salat, sehingga menolaknya merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah. Sikap tegas ini menunjukkan pemahaman beliau yang mendalam tentang prinsip kesetiaan kepada Islam dan pentingnya ketaatan kepada hukum Allah sebagai fondasi persatuan umat. Berkat kemenangannya dalam Perang Riddah, Abu Bakar berhasil memulihkan stabilitas dan menegakkan kembali kekuasaan Islam di seluruh Jazirah Arab, sehingga membuka jalan bagi penyebaran Islam ke wilayah-wilayah di luar Arabia (Insani, N. 2021).

Selain berfokus pada stabilitas politik dan agama, Abu Bakar juga menunjukkan kepedulian yang besar terhadap pelestarian wahyu Allah. Setelah banyak penghafal Al Qur'an gugur dalam Pertempuran Yamamah, beliau membuat keputusan penting dengan memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan semua ayat Al-Qur'an yang tersimpan dalam berbagai media dan dihafal oleh para sahabatnya. Proyek penyusunan mushaf ini merupakan langkah monumental dalam sejarah Islam, karena inilah pertama kalinya Al-Qur'an disusun menjadi satu kitab utuh. Tindakan ini tidak hanya melindungi kemurnian wahyu dari kemungkinan hilangnya, tetapi juga

meletakkan fondasi penting bagi kodifikasi Al-Qur'an, yang diselesaikan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan (Khafidah, W., et al 2025).

Dalam sistem pemerintahannya, Abu Bakar menerapkan sistem pemerintahan yang sederhana namun efektif, mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Beliau tidak hidup mewah, melainkan mengutamakan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam setiap kebijakannya. Abu Bakar menekankan pentingnya keadilan, akuntabilitas, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Beliau juga membangun struktur pemerintahan awal, menunjuk pejabat-pejabat yang kompeten dan berintegritas tinggi untuk mengelola urusan masyarakat, termasuk militer, ekonomi, dan dakwah Islam.

Meskipun masa pemerintahannya hanya berlangsung sekitar dua tahun, Abu Bakar meninggalkan warisan kepemimpinan yang luar biasa bagi umat Islam. Beliau tidak hanya menyatukan kembali masyarakat yang tercerai-berai, tetapi juga meletakkan fondasi pemerintahan Islam yang berlandaskan nilai-nilai tauhid dan keadilan. Kepemimpinannya menjadi teladan ideal bagi para pemimpin Muslim sepanjang sejarah dalam menegakkan kebenaran, memelihara persatuan, dan memajukan iman di tengah tantangan sosial dan politik. Kepemimpinan Abu Bakar bukan hanya awal mula sistem kekhalifahan, tetapi juga tonggak penting dalam pembentukan peradaban Islam yang berlandaskan spiritualitas, moralitas, dan persatuan umat.

2. Era Khalifah Umar bin Khattab

Kepemimpinan Umar bin Khattab merupakan salah satu periode paling gemilang dalam sejarah pemerintahan Islam (Zainudin, E. 2015). Setelah wafatnya Abu Bakar al Siddiq, Umar melanjutkan kepemimpinannya dengan ketegasan, kecerdasan strategis, dan dedikasi luar biasa untuk kesejahteraan rakyat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang disiplin dan berwawasan luas, dengan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial. Di bawah pemerintahannya, Islam berkembang tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem politik dan pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Kekuasaan Islam meluas dengan pesat, meliputi Persia, Suriah, Palestina, dan Mesir, menjadikan Islam sebagai kekuatan besar dan kekuatan yang disegani di dunia pada masanya (Khalid, M. I. 2024).

Salah satu warisan terbesar Umar bin Khattab adalah pembentukan sistem administrasi pemerintahan yang efisien dan terstruktur. Ia mendirikan Diwan, sebuah lembaga administrasi negara yang mencatat pendapatan dan pengeluaran serta mengelola keuangan publik. Melalui Diwan, Umar menetapkan sistem gaji tetap bagi prajurit, pejabat, dan pegawai negeri, yang memastikan mereka tidak bergantung pada rampasan perang. Kebijakan ini mencerminkan kematangan visi politiknya untuk membangun pemerintahan yang adil dan independen. Lebih lanjut, Umar membagi kesultanan Islam menjadi beberapa provinsi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur (wali) yang melapor langsung kepadanya. Setiap gubernur diwajibkan untuk secara berkala melaporkan kondisi sosial, ekonomi, dan agama di wilayahnya, sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap kinerja pemerintah daerah (Gultom, M. 2021).

Umar bin Khattab juga sangat mementingkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Ia memulai pembangunan berbagai fasilitas umum seperti jalan, jembatan, pos pemeriksaan, sumur, dan tempat peristirahatan bagi para musafir. Program-program sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan menjamin penghidupan non-Muslim di bawah perlindungan negara juga menjadi prioritas dalam kebijakannya. Umar menekankan bahwa setiap pemimpin harus

memastikan tidak ada seorang pun yang kelaparan di bawah pemerintahannya, bahkan melakukan inspeksi malam hari untuk menilai langsung kondisi rakyatnya.

Di bidang hukum dan peradilan, Umar dikenal sebagai penganjur keadilan yang imparisial. Ia mendirikan lembaga qadha (penghakiman) dan menunjuk hakim (qadi) di berbagai daerah untuk menerapkan hukum Islam secara adil. Prinsip-prinsip hukum yang ia terapkan didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial. Umar tidak ragu untuk menghukum pejabat tinggi yang melanggar hukum, menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal dan imparisial (Sulistiani, S. L. 2021).

Selain dikenal sebagai negarawan, Umar juga memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban Islam melalui kebijakan administratif dan sosialnya yang visioner. Ia memperkenalkan kalender Islam sebagai kalender resmi negara, yang tetap menjadi simbol identitas Muslim hingga saat ini. Umar juga mengatur sistem perpajakan, termasuk pajak kharaj dan jizyah, berdasarkan prinsip keadilan dan kemakmuran bersama. Pendapatan negara dikelola secara transparan untuk kepentingan umum, bukan untuk kemewahan para penguasa (Umar, H. N. 2021).

Kepemimpinan Umar bin Khattab secara keseluruhan mencerminkan sinergi kekuatan spiritual dan ketajaman manajerial. Pemerintahannya menandai tonggak penting dalam pembentukan struktur pemerintahan Islam yang kuat, terorganisir, dan berorientasi pada kepentingan publik. Reformasi politik, sosial, dan ekonomi yang dijalankannya menjadikan pemerintahannya dikenal sebagai salah satu masa keemasan peradaban Islam awal. Keteguhan, integritas, dan rasa tanggung jawabnya menjadikan Umar bin Khattab teladan bagi para pemimpin Muslim sepanjang sejarah.

3. Era Khalifah Utsman bin Affan

Kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah pemerintahan Islam. Sebagai khalifah ketiga setelah Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin al-Khattab, Utsman menghadapi tantangan berat dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat birokrasi, dan menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah ekspansi wilayah yang begitu luas (Ramzar, A., Harahap, M. H., & Kamil, T. N. A. 2025). Ia dikenal sebagai pemimpin yang baik hati, santun, dan dermawan, serta memiliki kepribadian yang welas asih kepada rakyatnya. Utsman juga memiliki keterampilan administratif yang tinggi dan wawasan strategis dalam mengelola pemerintahan yang semakin kompleks. Kepemimpinannya menandai transisi dari fase konsolidasi menuju fase ekspansi besar-besaran dalam sejarah Islam.

Salah satu kontribusi terbesar dan paling monumental Utsman bin Affan adalah inisiatifnya untuk mengumpulkan dan menstandarisasi manuskrip Al-Qur'an. Seiring penyebaran Islam ke berbagai wilayah seperti Irak, Suriah, Mesir, dan Persia, perbedaan dialek di antara suku-suku Arab menyebabkan variasi dalam pengucapan Al-Qur'an. Utsman melihat potensi besar perpecahan dalam hal ini. Oleh karena itu, dengan kebijaksanaan dan kepeduliannya terhadap integritas ajaran Islam, ia membentuk sebuah komite resmi yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubayr, Sa'id bin Al-'As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Tugas utama komite ini adalah menyalin Mushaf dari salinan utama yang dikodifikasi pada masa pemerintahan Abu Bakar. Setelah selesai, Mushaf standar ini dikirim ke berbagai pusat kekuasaan Islam, sementara salinan lain dengan bacaan yang berbeda dibakar untuk mencegah konflik. Langkah ini menunjukkan visi Utsman untuk menjaga kemurnian wahyu Tuhan dan menyatukan umat Islam dalam satu bacaan yang terpadu. Bahkan hingga saat ini, mushaf ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang tetap menjadi bacaan standar Al-Qur'an di seluruh dunia Islam (Wahyuni, S., et al 2025).

Dalam bidang pemerintahan dan administrasi, Utsman melanjutkan sistem birokrasi yang dibangun oleh pendahulunya, Umar bin Khattab, tetapi melakukan beberapa perbaikan penting. Ia memperkuat diwan (arsip administrasi keuangan negara) dengan memperluas pendataan dan memperjelas sistem remunerasi bagi pegawai negeri sipil dan tentara. Kebijakan keuangan negara juga diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan pemerataan distribusi di antara provinsi-provinsi. Lebih lanjut, ia menetapkan peraturan administratif yang lebih ramping untuk pengangkatan gubernur di wilayah yang baru ditaklukkan, seperti Mesir, Suriah, dan Irak. Dalam hal ini, Utsman dikenal karena kehati-hatiannya dan pertimbangannya terhadap kemampuan serta loyalitas orang-orang yang ditunjuknya, meskipun kebijakan ini kemudian menimbulkan ketegangan politik di beberapa sektor masyarakat (Samudera, M. A., et al 2025).

Khalifah Utsman juga sangat menekankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Beliau mendorong pembangunan berbagai masjid, jembatan, jalan raya, dan sumur umum untuk mendukung kesejahteraan penduduk di kerajaan Islam yang sedang berkembang. Banyak dari proyek-proyek ini didanai dari kekayaan pribadinya, menunjukkan dedikasi dan kemurahan hatinya yang mendalam kepada masyarakat. Salah satu warisan terpenting dari masa pemerintahannya adalah perluasan Masjid Nabawi di Madinah, yang dibangun untuk menampung lebih banyak jemaah sebagai respons terhadap pertumbuhan populasi Muslim.

Dalam hal perluasan militer dan wilayah, Utsman berhasil membawa kejayaan baru bagi kekhalifahan Islam. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Islam meluas hingga mencakup Armenia, Azerbaijan, Afrika Utara, Siprus, dan sebagian besar Asia Tengah. Salah satu pencapaiannya yang paling menonjol adalah pembentukan armada laut Islam pertama, yang menjadi fondasi kekuatan maritim dunia Islam. Armada ini digunakan untuk melindungi jalur perdagangan dan melawan kekuatan Bizantium di Mediterania. Dalam beberapa pertempuran besar, seperti pertempuran laut Siprus dan Rhodes, pasukan Islam meraih kemenangan gemilang yang memperkuat posisi strategis Khilafah di wilayah Mediterania (Muvid, M. B. 2022).

Selain kemajuan militer, Utsman juga mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan internal, mendirikan pos-pos jaga di wilayah perbatasan, dan mengatur sistem logistik bagi pasukan yang bertugas di luar negeri. Kebijakan-kebijakannya yang terencana dan terarah membuat pemerintahan Islam lebih stabil dan efisien, sekaligus membuka jalan bagi hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga.

Namun, terlepas dari semua keberhasilan besar ini, pemerintahan Utsman tidak lepas dari gejolak politik dan sosial yang serius. Ekspansi yang luas menyebabkan munculnya berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda. Ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pengangkatan pejabat daerah dari kerabat Utsman (keluarga Umayyah) memicu konflik politik. Situasi ini diperparah oleh provokasi dan fitnah yang dilancarkan oleh mereka yang ingin menggoyahkan Khilafah. Meskipun tekanan semakin meningkat, Utsman tetap teguh pada prinsip keadilannya dan menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan demi mempertahankan posisinya (Azra, A. 2016).

Kesabaran dan keteguhan Utsman dalam menghadapi fitnah menjadi teladan moral yang unggul. Ketika kelompok pemberontak akhirnya mengepung rumahnya di Madinah, Utsman memilih untuk tidak melawan, bahkan memerintahkan para pengawalnya untuk tidak menumpahkan darah rekan-rekan seimannya. Terlepas dari keadaan tersebut, ia tetap tenang, membaca Al-Qur'an, dan akhirnya wafat sebagai syahid di rumahnya sendiri. Tragedi ini menandai titik balik yang signifikan dalam

sejarah Islam, karena wafatnya Utsman memicu ketegangan politik yang membuka jalan bagi konflik internal berikutnya.

Secara keseluruhan, masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan menunjukkan kombinasi luar biasa antara iman, integritas, dan kepemimpinan visioner. Ia tidak hanya memperluas wilayah kerajaan Islam secara geografis, tetapi juga memperkuat fondasi ideologis dan administratif yang akan menjadi dasar pemerintahan Islam selanjutnya. Kebijakan ekonominya memperkuat keuangan negara, sistem administrasinya menciptakan efisiensi birokrasi, dan pembentukan armada laut membuka babak baru dalam sejarah strategi pertahanan Islam. Lebih lanjut, pengumpulan dan standarisasi manuskrip Al-Qur'an menjadi warisan spiritual yang abadi, menunjukkan dedikasi yang mendalam terhadap ajaran Islam.

Khalifah Utsman bin Affan merupakan pemimpin yang berperan penting dalam membentuk wajah peradaban Islam klasik. Kepemimpinannya menunjukkan keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan akhirat, serta menjadi teladan bagi para pemimpin selanjutnya dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan zaman.

4. Era Khalifah Ali bin Abi Thalib

Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib (656–661 M) merupakan salah satu periode paling kompleks dan dinamis dalam sejarah Islam. Ali diangkat sebagai khalifah keempat setelah wafatnya Utsman bin Affan, di saat situasi sosial-politik umat Islam sedang berada di puncaknya. Tragedi pembunuhan Utsman memunculkan berbagai kelompok dengan kepentingan politik yang berbeda, dan situasi ini menyebabkan krisis legitimasi bagi pemerintahan pusat di Madinah. Dalam situasi ini, Ali menerima kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab dan berkomitmen untuk memulihkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan persatuan umat yang terpecah belah (Nafsiyah, F. 2025).

Sebagai seorang pemimpin, Ali dikenal karena kecerdasan intelektualnya, keberanian moralnya, dan karakter spiritualnya yang mendalam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad (saw) sejak kecil dan merupakan salah satu sahabat yang meriwayatkan sebagian besar hadis dan memahami seluk-beluk hukum Islam. Dalam pemerintahannya, Ali menekankan pentingnya moralitas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Ia berusaha mengembalikan pemerintahan Islam kepada prinsip-prinsip dasar yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, dengan menolak segala bentuk nepotisme, korupsi, dan penyalahgunaan jabatan. Langkah-langkah reformasi ini, meskipun bertujuan baik, memicu reaksi keras dari para elit politik, yang merasa kehilangan pengaruh dan kekuasaan.

Salah satu kebijakan utama Ali di awal pemerintahannya adalah pemecatan beberapa gubernur yang dianggap tidak dapat diandalkan dan tidak setia pada nilai-nilai Islam. Ia mengangkat pejabat baru berdasarkan integritas dan kemampuan, alih-alih berdasarkan kekerabatan atau tekanan politik. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk membersihkan struktur pemerintahan dari kepentingan pribadi, kebijakan ini justru menciptakan ketegangan dengan beberapa kelompok yang sebelumnya memegang posisi kekuasaan dalam pemerintahan Utsman. Hal ini menyebabkan konflik politik, terutama dengan kelompok-kelompok yang menuntut penuntutan segera terhadap para pelaku pembunuhan Khalifah Utsman, meskipun situasi keamanan saat itu menghalangi penyelidikan menyeluruh (Nafsiyah, F. 2025).

Krisis politik ini berpuncak pada dua perang besar di masa pemerintahan Ali: Pertempuran Jamal dan Pertempuran Siffin. Pertempuran Jamal bermula dari perbedaan pendapat antara Ali dan beberapa sahabat terkemuka, seperti Aisyah,

Thalhah, dan Zubair, mengenai penyelesaian pembunuhan Utsman. Meskipun pertempuran tersebut mengakibatkan korban di kedua belah pihak, Ali tetap gigih dalam upayanya untuk mengakhiri konflik melalui perdamaian dan rekonsiliasi. Sementara itu, Pertempuran Siffin mempertemukan pasukan Ali melawan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah, yang menuntut agar para pembunuh Utsman diadili sebelum mengakui kekhalifahan Ali. Konflik ini meningkat hingga mencapai titik arbitrase, yang melemahkan posisi politik Ali di antara sebagian pengikutnya dan memunculkan kelompok baru yang dikenal sebagai Khawarij, yang menentang kedua belah pihak (Wijayanti, E., & Arya, N. 2025).

Terlepas dari berbagai tekanan politik dan perpecahan dalam komunitas Muslim, Ali menunjukkan tekad yang luar biasa, berprinsip, dan tulus secara spiritual. Ia menolak kekerasan sebagai cara utama mempertahankan kekuasaan, dan memilih menyelesaikan perselisihan melalui dialog, keadilan, dan pertimbangan moral. Dalam khotbah khotbahnya yang bijak, Ali secara konsisten menekankan pentingnya kesetiaan pada kebenaran dan tanggung jawab moral setiap pemimpin. Pepatahnya yang terkenal, "Kebenaran tidak dikenal melalui manusia, tetapi manusia dikenal melalui kebenaran," merupakan bukti ketajaman visi dan kedalaman nilai-nilainya.

Di luar politik dan pemerintahan, Ali bin Abi Thalib juga meninggalkan warisan intelektual dan spiritual yang berharga. Pemikirannya tentang etika, keadilan sosial, dan filsafat kepemimpinan tercermin secara luas dalam karya-karya klasik seperti *Nahjul Balaghah*, kumpulan khotbah, surat, dan nasihatnya. Gagasannya menekankan pentingnya keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa. Bagi Ali, kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan demi kebaikan rakyat.

Di bidang sosial, Ali dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap rakyat jelata. Ia kerap terjun langsung ke lapangan untuk menilai kondisi masyarakat, membantu kaum miskin, dan memastikan keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi. Dalam sistem pemerintahan, Ali berupaya mengembalikan kesederhanaan pemerintahan, seperti pada zaman Nabi Muhammad dan Abu Bakar, serta menolak kemewahan dan korupsi yang mulai merajalela di kalangan pejabat. Kebijakan ekonominya berfokus pada pemerataan kekayaan dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan Baitul Mal (perbendaharaan) untuk mencegah penyalahgunaannya.

Namun, upaya mulia ini bukannya tanpa kendala yang berarti. Setelah peristiwa Tahkim, kekuatan politik Ali semakin melemah akibat perpecahan internal dan pemberontakan kelompok Khawarij yang kecewa. Dalam salah satu serangan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis ini, Ali akhirnya gugur syahid di Kufah pada tahun 661 M saat melaksanakan salat subuh. Wafatnya menandai berakhirnya era Khalifah yang Benar dan membuka babak baru dalam sejarah Islam: berdirinya Dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan (Rustan, N. A. 2020).

Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib merupakan periode perjuangan moral dan spiritual di tengah gejolak politik yang intens. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari kesuksesan duniawi, melainkan dari keteguhan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaannya menjadi teladan abadi bagi generasi-generasi Muslim sepanjang sejarah. Ali bukan hanya simbol kekuatan dan kecerdasan Islam awal, tetapi juga cerminan ideal seorang pemimpin yang menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi pemerintahan dan bimbingan umat.

KESIMPULAN

Era Khilafah (632-661 M) merupakan periode krusial dalam pembentukan fondasi peradaban Islam. Kepemimpinan Abu Bakar As-Shiddiq berfokus pada pemeliharaan persatuan umat dan penyusunan Al-Qur'an sebagai pedoman utama. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, struktur pemerintahan diperkuat, kerajaan Islam meluas secara signifikan, dan sistem administrasi negara yang sistematis dibangun. Selanjutnya, Utsman bin Affan menyempurnakan kodifikasi Al Qur'an dan memperluas kekuasaan Islam ke Afrika Utara dan Asia Tengah. Sementara itu, era Ali bin Abi Thalib diwarnai oleh gejolak politik dan konflik internal, tetapi ia tetap teguh dalam komitmennya terhadap keadilan. Secara keseluruhan, keempat khalifah berhasil membangun fondasi yang kokoh bagi perkembangan Islam sebagai peradaban yang adil berdasarkan nilai-nilai tauhid.

REFERENSI

- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Kencana, Jakarta.
- Gultom, M. (2021). Administrasi dalam pemerintahan Islam, *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 5(1):79-99.
- Insani, N. (2021). *Hukum Zakat: Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*. Deepublish, Yogyakarta.
- Khafidah, W., Hanton, H., Hidayati, N. N., Suwantoro, S., Huda, M. N., Prawirosastro, C. L., ... & Taufiq, A. (2025). Sejarah pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1):1-10.
- Khalid, M. I. (2024). *Islam Sebagai Kekuatan Politik: Perspektif Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Ilmiah.
- Muhammad, M. (2020). *Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah*. Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta.
- Muvid, M. B. (2022). Sejarah Kerajaan Turki Utsmani dan kemajuannya bagi dunia Islam, *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 20(2):26-57.
- Nafsiyah, F. (2025). Peradaban Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, *As-Sulthan Journal of Education*, 1(4):734-745.
- Ramzar, A., Harahap, M. H., & Kamil, T. N. A. (2025). Pemikiran politik pada masa Khulafaur Rasyidin, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(2):44-49.
- Rustan, N. A. (2020). *Konflik Bani Hasyim dan Bani Umayyah (Konflik Politik Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan)*. Doctoral dissertation, IAIN Parepare.
- Samudera, M. A., Musyafa, M. Z., Saputra, A. R. W. P. M., & Latua, A. (2025). Sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan, *Jurnal Psikososial dan Pendidikan*, 1(1):75-81.

Sulistiani, S. L. (2021). *Peradilan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.

Umar, H. N. (2021). *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Wahyuni, S., Lestari, A. R., Mulyani, M., Zuhri, M. T., Munawaroh, N., & Masripah, M. (2025). Sejarah kepemimpinan Utsman bin Affan: Analisis peranannya dalam perkembangan peradaban Islam, *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(2):706–720.

Wijayanti, E., & Arya, N. (2025). Tantangan Aisyah dan Zubair terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, *Al-Hasib: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3):115–124.

Zainudin, E. (2015). Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1):1–10